

ANALISIS PERENCANAAN AUDIT LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AUDIT (STUDI KASUS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK FACHRUDIN & MAHYUDDIN

¹⁾Abdul Halim, ²⁾Nurlela, ³⁾Yus Epi

^{1,2,3}Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Politeknik Ganesha Medan

Corresponding Email: ¹⁾ah2175769@gmail.com, ²⁾nurlela.hafizah28@gmail.com, ³⁾yusepi@polgan.ac.id

ABSTRAK - Perencanaan audit merupakan tahapan penting dalam audit laporan keuangan karena menjadi dasar bagi auditor dalam mengidentifikasi risiko, menentukan strategi audit, serta memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Fachrudin & Mahyuddin serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait proses perencanaan audit pada PT. XYZ. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik perencanaan audit yang diterapkan dengan ketentuan SPAP, khususnya SA 300, SA 315, SA 320, SA 330, SA 402, dan SA 520. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP Fachrudin & Mahyuddin telah melaksanakan perencanaan audit secara sistematis melalui sepuluh tahapan, meliputi penetapan strategi audit, penentuan materialitas, diskusi tim audit, identifikasi dan penilaian risiko, penetapan risiko signifikan, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, komunikasi kelemahan pengendalian intern, penyelesaian penilaian risiko, serta prosedur analitis pendahuluan. Secara umum, perencanaan audit telah sesuai dengan SPAP. Namun, dokumentasi tertulis atas kelemahan pengendalian intern dan pengembangan prosedur audit terkait transisi SAK ETAP ke SAK EP masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas audit yang lebih baik.

Kata Kunci: Perencanaan audit, audit laporan keuangan, SPAP, standar audit, SAK EP.

ABSTRACT - Audit planning is a critical stage in the financial statement audit process as it provides the foundation for identifying risks, determining audit strategies, and ensuring the effectiveness and efficiency of audit activities. This study aims to analyze the audit planning process implemented by KAP Fachrudin & Mahyuddin and evaluate its compliance with the Indonesian Public Accountant Professional Standards (SPAP). A qualitative method with a case study approach was employed. Data were collected through interviews, observations, and documentation related to the audit planning process of PT. XYZ. The analysis was conducted by comparing the firm's audit planning practices with the requirements of SPAP, particularly SA 300, SA 315, SA 320, SA 330, SA 402, and SA 520. The findings indicate that KAP Fachrudin & Mahyuddin has implemented a systematic audit planning process consisting of ten stages, including audit strategy

development, materiality determination, audit team discussions, risk identification and assessment, significant risk determination, understanding and evaluation of internal controls, communication of internal control deficiencies, completion of risk assessment procedures, and preliminary analytical procedures. Overall, the audit planning process is in compliance with SPAP. However, improvements are still needed in the written documentation of internal control deficiencies and the development of standardized audit procedures related to the transition from SAK ETAP to SAK Entitas Privat (SAK EP). These improvements are expected to further enhance audit quality.

Keyword: *Audit planning, financial statement audit, SPAP, auditing standards, SAK EP.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pelaporan perusahaan di berbagai negara. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai standar akuntansi yang diterima secara global. Dengan penerapan IFRS, laporan keuangan menjadi lebih komparatif, transparan, dan dapat dipahami oleh investor internasional, sehingga memudahkan akses perusahaan terhadap pasar modal global.

Adopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) menjadi langkah strategis bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Selain itu, IFRS menggunakan pendekatan berbasis prinsip yang lebih fleksibel dibandingkan standar berbasis aturan, memungkinkan laporan keuangan lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Meskipun penerapannya memerlukan penyesuaian, seperti perubahan sistem akuntansi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, manfaat jangka panjang yang ditawarkan jauh lebih besar [1].

Ikatan Akuntansi Indonesia kini menggunakan International Financial Reporting Standards (IFRS) sebagai panduan dalam Menyusun laporan keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 21, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan mengenai kinerja, posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dan perubahan posisi tersebut [2]. Dalam penyusunan laporan keuangan yang tersusun dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang

disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan berbagai jenis entitas di Indonesia. Pertama, SAK Umum, yang mengacu pada International Financial Reporting Standards (IFRS) dan diperuntukkan bagi entitas dengan akuntabilitas publik signifikan, seperti perusahaan terbuka serta entitas yang terdaftar di pasar modal. Kedua, SAK Entitas Privat (SAK EP), yang mulai berlaku pada Januari 2025 sebagai pengganti SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini dirancang khusus untuk entitas private yang tidak memiliki kewajiban pelaporan ke publik, dengan penyederhanaan dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan. Terakhir, SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), yang dirancang dengan pendekatan sederhana agar lebih mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022). Dengan adanya berbagai standar ini, IAI berupaya memastikan bahwa sistem akuntansi di Indonesia tidak hanya selaras dengan perkembangan standar internasional, tetapi juga dapat diakses dan diterapkan oleh berbagai jenis entitas, guna meningkatkan transparansi serta daya saing di tingkat global.

PT. XYZ merupakan perusahaan manufaktur dengan kegiatan utama bergerak dibidang industri sepatu olahraga yang terletak di Medan, Sumatera Utara. PT. XYZ merupakan salah satu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik sehingga menerapkan SAK ETAP dalam laporan keuangannya. Dengan mulai efektifnya SAK EP mulai 01 Januari 2025, maka PT. XYZ wajib mengikuti standar yang ada. Sektor tanpa akuntabilitas publik menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP dirancang untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik secara luas. Usaha kecil dan menengah tidak memiliki penawaran saham di pasar modal biasanya mengadopsi standar ini [3]. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, diperlukan standar akuntansi yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, SAK ETAP direvisi dengan mengacu pada IFRS for SMEs edisi 2015. Revisi ini kemudian ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 30 Juni 2021. Yang memperkenalkan Standar Akuntansi

Perencanaan audit merupakan tahap fundamental dan krusial dalam proses audit laporan keuangan yang menentukan efektivitas dan efisiensi keseluruhan

pelaksanaan audit. Standar Audit (SA) 300 secara tegas menegaskan bahwa perencanaan yang matang memungkinkan auditor untuk memberikan perhatian yang tepat pada area-area penting, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan efektif dan efisien. Tanpa perencanaan yang memadai, auditor berisiko mengalokasikan sumber daya secara tidak optimal, melewatkan area berisiko tinggi, atau gagal memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit yang diberikan.

Dalam konteks dinamika standar akuntansi yang terus berkembang, seperti transisi dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku efektif per 1 Januari 2025, perencanaan audit menjadi semakin kritis. Peralihan standar akuntansi membawa perubahan substantif dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berbagai unsur laporan keuangan, yang memerlukan pemahaman mendalam dari auditor serta penyesuaian strategi dan prosedur audit. Perencanaan audit yang komprehensif memastikan bahwa auditor dapat mengidentifikasi dampak perubahan standar, menilai risiko salah saji material yang mungkin timbul, merancang respons audit yang tepat, dan pada akhirnya memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas perencanaan audit tidak hanya menentukan efisiensi pelaksanaan audit, tetapi juga secara langsung mempengaruhi kualitas opini audit yang dihasilkan dan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap informasi keuangan yang disajikan.

Keuangan Entitas Private (SAK EP) sebagai pengganti SAK ETAP. SAK EP dirancang lebih komprehensif dan mulai berlaku efektif pada Januari 2025, namun entitas yang ingin menerapkannya lebih awal diperbolehkan mulai dari tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 [4]. Dengan efektifnya SAK EP terdapat perbedaan signifikan dibandingkan dengan SAK ETAP yang sebelumnya, oleh karena itu peneliti mencoba menganalisis perencanaan audit Kantor Akuntan Publik Fachrudin & Mahyuddin dalam studi kasus pengalihan laporan keuangan PT. XYZ dari berbasis SAK ETAP menjadi laporan keuangan berbasis SAK EP.

KAJIAN LITERATUR

Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan seperangkat prinsip, ketentuan, dan pedoman yang digunakan sebagai dasar dalam proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi serta peristiwa ekonomi dalam laporan keuangan. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas memiliki dasar penyusunan yang jelas, konsisten, dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi. Di Indonesia, penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Keuangan dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Penerapan SAK menjadi dasar bagi entitas dalam menentukan perlakuan akuntansi terhadap transaksi dan peristiwa ekonomi sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan dan kinerja entitas secara wajar [5]. Dalam penerapannya, Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia memiliki beberapa pilar yang disesuaikan dengan karakteristik entitas. Salah satunya adalah standar yang diperuntukkan bagi entitas privat, yaitu SAK Entitas Privat (SAK EP), yang menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sejak 1 Januari 2025 [6], [7]

Tujuan utama Standar Akuntansi Keuangan adalah menyediakan pedoman yang dapat digunakan entitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Informasi tersebut diperlukan oleh pemilik, manajemen, kreditur, investor, pemerintah, dan pihak eksternal lainnya dalam melakukan penilaian dan mengambil keputusan ekonomi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar akuntansi yang ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pengguna eksternal tersebut dapat meliputi pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit [8]. SAK ETAP dikembangkan sebagai standar yang

lebih sederhana dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, SAK ETAP merupakan standar yang berdiri sendiri dan tidak mengacu secara langsung kepada SAK Umum. Selain itu, SAK ETAP menggunakan pengaturan yang lebih sederhana serta sebagian besar menggunakan konsep biaya historis dalam pengukuran unsur laporan keuangan [8].

Tujuan SAK ETAP adalah menyediakan standar akuntansi yang sederhana dan sesuai dengan karakteristik entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Penyederhanaan SAK ETAP juga dimaksudkan untuk mengurangi beban penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang tidak memiliki kebutuhan pelaporan sekompleks perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. IAI juga menjelaskan bahwa penerapan SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi entitas dalam memperoleh pendanaan, termasuk pendanaan dari perbankan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar yang jelas dapat memberikan informasi yang lebih terstruktur kepada kreditur dalam menilai kondisi keuangan dan kemampuan entitas memenuhi kewajibannya [8].

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP).

SAK Entitas Privat (SAK EP) merupakan standar akuntansi yang diperuntukkan bagi entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK EP dikembangkan untuk memberikan kerangka pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan entitas privat dengan tingkat kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan SAK Umum [9]. SAK EP merupakan hasil adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan bisnis di Indonesia. Pengembangan standar tersebut merupakan bagian dari upaya DSAK IAI untuk menyediakan standar pelaporan keuangan yang relevan bagi entitas privat sekaligus tetap mempertahankan kesederhanaan penerapannya [6].

Tujuan SAK EP adalah menyediakan dasar penyusunan laporan keuangan bertujuan umum yang dapat memberikan informasi relevan dan andal bagi pengguna eksternal entitas privat. SAK EP dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pengguna laporan keuangan dan biaya penyusunan informasi. Oleh karena itu, SAK EP tidak memuat seluruh persyaratan yang

terdapat dalam SAK Umum. Beberapa topik yang tidak relevan bagi entitas privat dihilangkan, sementara sejumlah persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan disederhanakan [6]. Penyederhanaan tersebut memungkinkan entitas privat menghasilkan laporan keuangan yang tetap memiliki kualitas informasi memadai tanpa menghadapi kompleksitas penerapan standar yang diperuntukkan bagi entitas dengan akuntabilitas publik.

Peralihan SAK ETAP ke SAK EP

Peralihan SAK ETAP ke SAK EP merupakan bagian dari perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. SAK EP dikembangkan untuk memberikan standar yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan informasi keuangan entitas privat dan perkembangan standar akuntansi internasional. SAK EP disusun berdasarkan IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, SAK EP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan relevansi informasi keuangan entitas privat tanpa memberikan beban penerapan yang sama seperti SAK Umum [6].

Peralihan tersebut juga mencerminkan kebutuhan untuk memperbarui standar akuntansi yang digunakan oleh entitas nonpublik. SAK EP tidak hanya mempertahankan prinsip kesederhanaan, tetapi juga memperbarui sejumlah ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Perbedaan SAK ETAP dan SAK EP dapat dilihat dari dasar penyusunan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. SAK ETAP merupakan standar yang berdiri sendiri dengan pendekatan yang sederhana dan sebagian besar menggunakan biaya historis. Sementara itu, SAK EP merupakan standar yang diadopsi dari IFRS for SMEs dengan penyesuaian untuk Indonesia [6], [8]. SAK EP juga mengatur beberapa topik secara lebih rinci dibandingkan SAK ETAP, antara lain aset biologis, properti investasi, instrumen keuangan, kombinasi bisnis dan goodwill, pajak tangguhan, serta penghasilan komprehensif lain [6]. Perbedaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 1. Perbedaan SAK ETAP dan EP

Aspek	SAK ETAP	SAK EP
Sasaran	Entitas tanpa akuntabilitas publik	Entitas privat
Dasar penyusunan	Standar tersendiri	Adopsi IFRS for SMEs dengan penyesuaian Indonesia
Status	Standar sebelumnya	Menggantikan SAK ETAP
Pengukuran	Lebih sederhana dan dominan biaya historis	Terdapat beberapa pengukuran nilai wajar
Properti investasi	pengaturan lebih sederhana	pengaturan nilai wajar/biaya berdasarkan kondisi
Aset biologis	terbatas	diatur secara khusus
Goodwill	pengaturan lebih sederhana	pengaturan secara rinci
Pajak Tangguhan	pengaturan lebih sederhana	diatur secara lebih komprehensif
Penghasilan komprehensif lain	tidak seperti etap	diatur dalam SAK EP
pengungkapan	relative sederhana	sederhana, tetapi terdapat perubahan tertentu

Sumber: Data diolah 2026

Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Perencanaan audit merupakan tahap awal yang menentukan ruang lingkup, waktu, dan arah audit secara keseluruhan. Auditor perlu memahami bisnis klien, mengidentifikasi risiko, menentukan materialitas, serta menyusun strategi audit agar proses audit dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien (Mulyadi, 2017; SPAP SA 300). Perencanaan yang baik juga membantu auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit yang diberikan. Oleh karena itu, auditor harus merencanakan audit dengan mempertimbangkan kondisi bisnis klien, kebijakan akuntansi yang digunakan, sistem pengendalian intern, tingkat risiko, serta area laporan keuangan yang memerlukan perhatian khusus.

Tahap-Tahap Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Perencanaan audit laporan keuangan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dilaksanakan melalui sepuluh tahapan sistematis yang saling

berkaitan. Tahapan tersebut dimulai dengan penetapan strategi audit menyeluruh yang mendefinisikan ruang lingkup, waktu, dan arah audit sebagaimana diatur dalam SA 300, dilanjutkan dengan penentuan materialitas berdasarkan pertimbangan profesional sesuai SA 320, serta diskusi tim audit untuk memastikan pemahaman bersama mengenai risiko salah saji material sebagaimana dipersyaratkan SA 315. Selanjutnya auditor melakukan identifikasi dan penilaian risiko bawaan melalui prosedur inquiry, observation, dan inspection untuk mengidentifikasi area-area yang secara alamiah berisiko tinggi, kemudian menetapkan risiko signifikan yang memerlukan perhatian audit khusus, termasuk presumed fraud risk pada pengakuan pendapatan. Tahapan berikutnya adalah pemahaman pengendalian intern dengan mengevaluasi lima komponen COSO framework (lingkungan pengendalian, penilaian risiko entitas, sistem informasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan) dan evaluasi efektivitas pengendalian intern untuk menentukan luasnya substantive testing yang diperlukan sesuai SA 330.

Tahapan perencanaan audit dilanjutkan dengan komunikasi kelemahan pengendalian intern kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola sebagaimana diwajibkan SA 265, meskipun dalam praktik aspek dokumentasi tertulis masih perlu ditingkatkan. Auditor kemudian melakukan penyelesaian tahap penilaian risiko dengan mendokumentasikan seluruh temuan dalam kertas kerja audit yang memadai sesuai SA 230, serta menyusun rencana respons terhadap risiko yang teridentifikasi. Tahapan terakhir adalah pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan sebagaimana diatur dalam SA 520, yang mencakup trend analysis untuk membandingkan data keuangan antarperiode, ratio analysis untuk mengevaluasi kinerja keuangan (liquidity, profitability, efficiency, dan leverage ratios), reasonableness test untuk mengestimasi nilai akun tertentu, serta analisis hubungan antar akun untuk mengidentifikasi fluktuasi yang tidak biasa atau tidak sesuai ekspektasi. Keseluruhan tahapan perencanaan audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa audit dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada KAP Fachrudin & Mahyuddin untuk menganalisis perencanaan audit laporan keuangan PT. XYZ. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan supervisor audit, partner KAP, dan manajemen PT. XYZ, serta data sekunder berupa dokumen perencanaan audit dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan selama praktik kerja lapangan pada periode September hingga November 2025. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan praktik perencanaan audit yang diterapkan oleh KAP Fachrudin & Mahyuddin dengan ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya SA 300, SA 315, SA 320, SA 330, SA 402, dan SA 520, untuk menilai tingkat kesesuaian serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAP Fachrudin & Mahyuddin telah melaksanakan perencanaan audit laporan keuangan PT. XYZ secara sistematis melalui sepuluh tahapan utama, yaitu penetapan strategi audit menyeluruh, penentuan materialitas, diskusi tim audit, identifikasi dan penilaian risiko bawaan, penetapan risiko signifikan, pemahaman pengendalian intern, evaluasi pengendalian intern, komunikasi kelemahan pengendalian intern, penyelesaian tahap penilaian risiko, serta pelaksanaan prosedur analitis pendahuluan. Dalam pelaksanaannya, auditor memberikan perhatian khusus terhadap transisi PT. XYZ dari SAK ETAP ke SAK Entitas Privat (SAK EP) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 karena berpotensi meningkatkan risiko salah saji material pada laporan keuangan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko utama yang menjadi perhatian auditor meliputi pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, piutang usaha, penerapan instrumen keuangan, serta pengakuan pajak tangguhan yang muncul akibat penerapan SAK EP. Untuk memitigasi risiko tersebut, auditor melakukan penilaian risiko yang lebih mendalam, memperluas prosedur audit, serta meningkatkan alokasi waktu dan sumber daya audit. Selain itu, auditor juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern PT. XYZ dan menemukan

beberapa kelemahan, seperti dokumentasi prosedur yang belum diperbarui, Proses audit PT. XYZ melibatkan puluhan jenis dokumen yang dapat dikategorikan menjadi; (1) Dokumen dari KAP (perencanaan, kertas kerja, komunikasi). (2).Dokumen dari PT. XYZ (laporan keuangan, kontrak, prosedur, sistem), dan (3).Dokumen pihak ketiga (konfirmasi bank, legal, supplier/customer), pemisahan tugas yang belum optimal, serta keterbatasan sistem informasi dalam mendukung kebutuhan pelaporan sesuai SAK EP.

Berdasarkan perbandingan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), perencanaan audit yang diterapkan KAP Fachrudin & Mahyuddin secara umum telah sesuai dengan ketentuan SA 300, SA 315, SA 320, SA 330, SA 402, dan SA 520. Dari sembilan aspek yang dianalisis, tujuh aspek dinilai telah sesuai dengan standar yang berlaku. Namun, terdapat dua aspek yang masih perlu ditingkatkan, yaitu dokumentasi tertulis atas komunikasi kelemahan pengendalian intern sesuai SA 265 dan penyusunan prosedur audit yang lebih terstandarisasi untuk klien yang sedang melakukan transisi dari SAK ETAP ke SAK EP. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan audit yang diterapkan KAP Fachrudin & Mahyuddin telah mendukung pelaksanaan audit yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Fachrudin & Mahyuddin pada PT. XYZ telah dilaksanakan secara sistematis dan umumnya sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Auditor telah menerapkan tahapan perencanaan audit yang meliputi pemahaman bisnis dan lingkungan klien, penentuan materialitas, identifikasi dan penilaian risiko, evaluasi pengendalian intern, serta pelaksanaan prosedur analitis sebagai dasar penyusunan strategi dan program audit. Dalam prosesnya, auditor juga mempertimbangkan dampak penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP) yang menggantikan SAK ETAP sehingga area-area yang berisiko tinggi dapat diidentifikasi dengan lebih baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dokumentasi tertulis atas komunikasi kelemahan pengendalian intern serta penyusunan prosedur audit yang lebih terstandarisasi terkait transisi ke SAK EP. Secara keseluruhan, perencanaan audit

yang diterapkan telah mendukung pelaksanaan audit yang efektif, efisien, dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. T., "Pengaruh Implementasi IFRS Pada Laporan Keuangan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi STIEP*, vol. 8, pp. 101-106, 2023.
- [2] I. A. Indonesia, PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan, Jakarta, 2022.
- [3] N. S. D. H. & R. Khairiyan, "Analisis Penerapan SAK Entitas Privat (SAK EP Pada Laporan Keuangan Koperasi CNS)," *Journal of management & Business*, vol. 7, pp. 689-698, 2024.
- [4] E. F. M. & R. Lusiono, "Penyusunan SAK Entitas Privat Pada Koperasi Sutdi Kasus Credit Union Sari Intugin," *Jurnal Rambu Reasearch of Accounting, Management, & Busniess*, vol. 1, pp. 30-40, 2024.
- [5] I. A. Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024.
- [6] I. A. Indonesia, "Tentang SAK Entitas Privat (EP)," [Online]. Available: <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20Entitas%20Privat%20%28EP%29>.
- [7] Indonesia, Ikatan Akuntan, "Pengesahan SAK Entitas Privat," 2021.
- [8] Ikatan Akuntan Indonesia, Tentang SAK ETAP, <https://web.iaiglobal.or.id/SAK-IAI/Tentang%20SAK%20ETAP>.
- [9] Ikatan Akuntan Indonesia, SAK Entitas Privat, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.